

Evaluasi Pelaksanaan Tugas Upt Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Mengawasi Dan Mengendalikan Parkir Di Kota Pekanbaru

Zulharyanto Hadyan¹, Andriyus²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fisipol, Universitas Islam Riau

* zulharyantohadyan@student.uir.ac.id

Abstrak

Banyak sekali permasalahan parkir terutama yang berhubungan dengan juru parkir mulai dari atribut yang tidak lengkap, hingga sikap petugas parkir yang arogan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Evaluasi tentang Pelaksanaan Tugas dan Untuk mengetahui kendala yang dihadapi UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Mengawasi dan Mengendalikan Parkir Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan ialah metode kualitatif. Hasil Penelitian ini adalah Efektivitas Pelaksanaan pengawasan parkir di Kota Pekanbaru belum efektif karena masih dijumpai para petugas atau juru parkir yang melakukan penjagaan tidak sesuai jam operasional Efisiensi pengelolaan Kawasan parkir di kota Pekanbaru masih belum tertata dengan baik. Kecukupan dalam Penyediaan parkir di Kota Pekanbaru belum mengcover semua kebutuhan parkir umum masyarakat kota Pekanbaru. Pemerataan dapat disimpulkan bahwa penyerahan uang retribusi oleh pihak UPT Perparkiran diserahkan seluruhnya. Responsivitas dalam peran masyarakat ialah memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan perilaku para juru parkir. Ketepatan dapat dilihat dari masyarakat dan pemerintah saling bekerjasama dan juga harus saling berkolaborasi untuk menentukan lokasi-lokasi yang mana yang boleh dan tidak boleh untuk parkir. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dan pengawasan terhadap pengelolaan parkir di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut : Kendalanya ialah luasnya wilayah kota pekanbaru. Masih kurangnya kamera pengawas cctv pada setiap titik parkir. Masyarakat yang juga terkadang tidak mendukung pengawasan dengan tidak memberikan laporan sehingga evaluasi.

Kata kunci: Dishub , Evaluasi, Pengawasan, UPT Perparkiran

Abstract

There are many parking problems, especially those related to parking attendants, ranging from incomplete attributes to arrogant parking attendants. The purpose of this study was to determine the Evaluation of the Implementation of Tasks and to determine the obstacles faced by the Parking UPT of the Pekanbaru City Transportation Service in Supervising and Controlling Parking in Pekanbaru City. The method used is a qualitative method. The results of this study are the Effectiveness of the Implementation of parking supervision in Pekanbaru City has not been effective because there are still officers or parking attendants who do not carry out guarding according to operational hours. The efficiency of parking area management in Pekanbaru City is still not well organized. The adequacy of parking provision in Pekanbaru City has not covered all the public parking needs of the Pekanbaru City community. Equity can be concluded that the submission of retribution money by the Parking UPT is submitted entirely. Responsiveness in the role of the community has an important role in supervising the behavior of parking attendants. Accuracy can be seen from the community and the government working together and also having to collaborate to determine which locations are allowed and not allowed for parking. The obstacles faced in the management and supervision of parking management in Pekanbaru City are as follows: The obstacle is the vast area of Pekanbaru City. There is still a lack of CCTV surveillance cameras at each parking point. The community also sometimes does not support supervision by not providing reports so that evaluation.

Keywords: Dishub, Evaluation, Supervision, Parking UPT

PENDAHULUAN

Didalam Pasal 18 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ditegaskan kedudukan Desa sebagaimana system pemerintahan terendah dalam saturant pemerintahan pada ayat (1) dikatakan Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat Istimewa yang diatur dengan Undang-Undang, sedangkan pada ayat (2) dikatakan Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan Undang-Undang.

Untuk mengemban amanat Undang-Undang tersebut pemerintah membutuhkan dukungan dari aparatur pemerintahan yang professional dan mampu berkarya serta menciptakan daya saing yang sehat. Dengan demikian pemerintah daerah sebagai pelaksana amanat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat harus memiliki kemampuan mengelola seluruh sumber daya yang tersedia di daerahnya masing-masing.

Pemerintah Daerah diatur oleh Pasal 18 UUD 1945 ayat 1 menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah Provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, ayat tersebut menyatakan bahwa pemerintah Daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, atau pengertian otonomi sama artinya mengatur rumah tangga sendiri. Pelaksanaan Otonomidaerah memiliki konsekuensi dilaksanakan asas desentralisasi memang sudah banyak memberikan perubahan yang baik terutama terhadap perkembangan daerah.

Dengan adanya sistem desentralisasi tersebut merupakan kewenangan yang diberikan seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri baik itu urusan pemerintah maupun urusan pilihan. Tugas pokok pemerintah terbagi kedalam tiga bagian yaitu pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Pelayanan yang baik akan membuahkan keadilan yang tumbuh ditengah-tengah masyarakat. Pemberdayaan akan mendorong kemandirian yang dimiliki masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

Parkir adalah menempatkan atau memangkalkan kendaraan bermotor diluar badan jalan baik itu yang disediakan oleh suatu tempat usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk juga suatu tempat yang disediakan untuk menjadi tempat penitipan kendaraan bermotor maupun garasi kendaraan yang memungut bayaran. Pada sarana transportasi dibagi menjadi tiga bagian yaitu kendaraan, sarana lalu lintas serta terminal. Hubungan kendaraan yang bergerak diatas jalan lalu lintas hingga berhenti disuatu tujuan tentu membuat kendaraan membutuhkan tempat berhenti dan menempatkan kendaraan tersebut itulah yang disebut sebagai sebuah tempat parkir. Penyediaan fasilitas parkir tersebut juga memiliki fungsi untuk menjadi pengendali lalu lintas.

Semakin pesatnya kemajuan yang dialami oleh Kota Pekanbaru namun tidak diimbangi dengan kesiapan infrastruktur parkir ditempat-tempat keramaian. Pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kepemilikan kendaraan pribadi dan hal tersebut tentu saja menimbulkan penigkatan pada permintaan lahan parkir untuk menempatkan kendaraan mereka saat berada ditempat umum. Parkir merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada pada masyarakat dalam hal pelayanan serta parkir juga merupakan sumber pendapatan daerah (PAD) atau Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi parkir di badan jalan.

Pengaturan terhadap parkir tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tepatnya pada BAB XXII tentang Pengelolaan Parkir. Dalam ketentuan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru

tersebut dalam pasal 1 angka 35 menyatakan bahwa parkir merupakan posisi kendaraan berhenti atau tidak bergerak yang untuk beberapa saat kendaraan tersebut di tinggalkan oleh pemiliknya dan atau pengemudinya. Serta fasilitas parkir merupakan suatu lahan atau lokasi yang disediakan sebagai tempat pemberhentian kendaraan tersebut. Parkir merupakan fasilitas yang diambil dari bagian atau badan jalan.

Penyelenggaraan dan pengelolaan parkir diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perparkiran adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (DISHUB). Dalam pasal 2 menyebutkan :

- 1) Penyelenggaraan dan pengelolaan tempat parkir umum, parkir khusus yang dikelola oleh swasta, pemerintah dan parkir insidental dilakukan dan atau diawasi oleh Pemerintah Daerah dengan menunjuk Dinas Perhubungan atau Instansi lainnya untuk melaksanakan tugas tersebut dengan keputusan walikota.
- 2) Penyelenggaraan dan pengelolaan tempat Parkir umum di badan jalan dapat dibagi beberapa kawasan khusus.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam peraturan walikota.
- 4) Dinas perhubungan dan atau instansi lainnya dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran melaksanakan tugas dan kewajiban serta bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan perparkiran kepada masyarakat yang meliputi kegiatan:
 - a) Lalu lintas kendaraan masuk dan keluar serta penataan kendaraan di tempat parkir.
 - b) Penyerahan karsis retribusi parkir dan menerima pembayaran retribusi sebagai imbalan jasa pelayanan parkir.
 - c) Pengaturan keamanan lalu lintas dan ketertiban kendaraan yang di parkir.

Tugas pokok dan fungsi yang dimiliki UPT Parkir terhadap pengawasan perparkiran yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru disebutkan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 284 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Perparkiran Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Tugas dan Fungsi Kepala UPT. Perparkiran disebutkan dalam pasal 5 yaitu sebagai berikut :

- 1) Kepala UPT perparkiran mempunyai tugas membantu kepaladinas dalam melaksanakan urusan dibidang perhubungan sub urusan pengelolaan parkir.
- 2) Fungsi Kepala UPT dalam menjalankan tugas adalah sebagai berikut :
 - a) Pengelolaan sistem dan tata cara pengaturan parkir diberbagai kawasan diwilayah Kota Pekanbaru.
 - b) Pelaksanaan ketertiban dan kelancaran lalu lintas pada kawasan parkir.
 - c) Pelaksanaan penindakan terhadap kendaraan yang melanggar parkir dengan melaksanakan pendekatan.
 - d) Pelaksanaan tugas bersama dengan perangkat kerja atau instansi terkait dalam pengaturan serta penyelenggaraan perparkiran.
 - e) Pelaksanaan pengupayaan Standar Pelayanan Minimal pada kegiatan perparkiran.
 - f) Pelaksanaan Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan perparkiran.
 - g) Pelaksanaan Pengaturan dan pengawasan kendaraan bermotor yang menggunakan jasa perparkiran.
 - h) Pengaturan pelaksanaan mekanisme pungutan retribusi parkir.

- i) Pelaksanaan penyerahan hasil pungutan retribusi parkir kepada bendahara yang kemudian disetorkan ke kas daerah.
- j) Pelaksanaan pembuatan dan penyampaian laporan hasil operasional penyelenggaraan perparkiran.
- k) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas-tugasnya.

Tugas dan fungsi Kasubbag TU disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 284 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Perparkiran Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

- 1) Kasubbag Tu mempunyai tugas untuk merencanakan menyusun, merumuskandan melaksanakan programkerja ketatausahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kasubbag TU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan Fungsi :
 - a) Pelaksanaan pemberian pelayanan administrasi kepada semua unsur lingkungan UPT. Perparkiran.
 - b) Pelaksanaan pembuat dan pengaturan kebutuhan perbekalan dan materi lingkungan UPT. Perparkiran.
 - c) Pelaksanaan Verifikasi terhadap penerimaan dan pengaturan serta pertanggungjawaban keuangan UPT. Perparkiran
 - d) Pelaksanaan penginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan perparkiran serta menyajikan alternatif pemecahannya.
 - e) Pelaksanaan pembagian tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing.
 - f) Pelaksanaan pelayanan menerima dan menampung setiap laporan tentang parkir yang diterima oleh para pengguna jasa pengelolaan dilapangan yang selanjutnya untuk dikoordinasikan Kepada Kepala UPT Perparkiran.
 - g) Pelaksanaan pemberian motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi dedikasi dan loyalitas bawahannya.
 - h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT Perparkiran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penggunaan faslitas parkir oleh para pengendara kendaraan bermotor tentu saja dikenakan tarif retribusi parkir yang berguna sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Adanya fasilitas parkir tersebut tentu saja harus didukung dengan SOP yang jelas agar pelayanan parkir selalu baik dan memuaskan semua masyarakat pengguna fasilitas parkir tersebut. SOP atau Standar Operasional Prosedure parkir dikota pekanbaru adalah sebagai berikut :

- 1 Adanya Koordinator Parkir
- 2 Adanya juru parkir
- 3 Adanya TIM Survey UPTD Parkir
- 4 Adanya juru Pungut dan
- 5 Adanya Bendahara Penerimaan

Dalam rangka pengawasan walikota dan pejabat yang telah ditentukan wajib mengawasi dengan menggunakan Sistem Teknologi Informasi di Setiap Objek Parkir telah disebutkan dalam ketentuan pasal 34A Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir. Standar Operasonal Prosedure parkir tersebut tentu saja

dibuat guna untuk menghindari adanya kesalahan dalam menjalankan pelaksanaan penyediaan lahan parkir agar menghindari penyalagunaan jabatan lahan parkir tersebut.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah dalam pasal 101 Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah pada ayat 1 menyebutkan bahwa Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi dapat diberik insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Pada ayat 2 menyebutkan Peberian insentif tersebut melalui Anggaran Pendapatan Daerah.

Pengawasan dan penguadalian lahan parkir tersebut tentu saja menjadi tugas dari UPT perparkiran sehingga dengan demikian terciptlaparkir yang tertata dan masyarakat dapat meninggalkan kendaraannya dengan aman. Pengawasan yang dilakukan oleh UPT Parkir harus dilakukan dengan sebaik mungkin agar permasalahan parkir tersebut tidak terus bertambah. Pengawasan terhadap sikap petugas parkir dan sistem pemungutan parkir tersebut harus menjadihal wajib untuk di perhatikan. Serta penguendalian lahan parkir yang tidak terorganisir juga harus segera ditertibkan agar tidak menimbulkan kerugian bagi Kota Pekanbaru dan Masyarakat Kota Pekanbaru.

Titik parkir wilayah Kota Pekanbaru Sejumlah 1.582 yang legal dan sejumlah 1000 titik dikelola dengan sistem kerja sama bagihasil yang dilakukan bersama PT. Yabisa Sukses Mandiri dengan pola kerjasama bersama UPT Parkir. Kerja sama pengelolaan parkir yang dilakukan antara PT.Yabisa dengan UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dilakukan sejak tanggal 1 september 2021 dan kerjasama ini akan berlangsung selama 10 tahun. Kontrak kerjasama yang dilakukan dengan pola bagi hasil yaitu dengan total 5% dari pendapatan parkir selama satu tahun.

Namun pada kenyataannya dalam praktek pengelolaan lahan parkir dikota pekanbaru masih banyak dijumpai beberapa permasalahan. Salah satu permasalahan parkir dikota pekanbaru adalah banyaknya lahan parkir yang tidak terorganisir yang dapat dibuktikan dengan banyak para juru parkir tidak pernah memberikan karcis parkir dan tidak menggunakan atribut lengkap. Salah Satu kasus terbaru yang terjadi di Indomaret Jalan Jendral Sudirman Kota Pekanbaru Tepatnya di Indomaret samping Rumah Sakit Syafira yang mana Ada seorang Petugas parkir yang meminta uang parkir tanpa memberikan karcis parkir terlebih dahulu setelah pengunjung indomaret tersebut bertanya perihal karcis parkirnya juru parkir tersebut beralasan bahwa karcis parkir belum datang dikarenakan hari masih sangat pagi. Akhirnya terjadilah keributan antara juru parkir dan pengunjung Indomaret tersebut (Sumber: Instragram Info Pekanbaru).

Permasalahan Parkir yang lain juga pernah terjadi di Jalan Datuk Setia Maharaja dimana seorang juru parkir bertengkar dengan seorang pensiunan polisi dikarenakan sikap arogan dan gaya seorang juru parkir yang seperti pereman. Petugas parkir tersebut mengatur kendaraan dengan gaya yang angkuh kemudian saat seorang bapak tersebut memarikirkan kendaraannya dengan posisi yang salah petugas parkir datang marah-marah dan mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada bapak tersebut sehingga memancing kemarahan dari bapak tersebut.

Tidak hanya hal-hal yang disebutkan diatas banyak sekali permasalahan parkir terutama yang berhubungan dengan juru parkir mulai dari atribut yang tidak lengkap, hingga sikap petugas parkir yang arogan. Pada tahun 2023 merupakan tahun yang paling banyak terdengar permasalahan parkir di Kota Pekanbaru beberapa Fenomena-fenomena tersebut merupakan suatu permasalahan yang harus diselesaikan. Adapun beberapa fenomena lain yang dijumpai di lapangan adalah sebagai berikut :

- 1 Pengawasan yang kurang efektif dari pihak UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Terhadap pengelolaan pemungutan parkir dilapangan.
- 2 Banyaknya lahan Parkir yang tidak teroganisir .
- 3 Banyak dijumpai juru parkir yang bertingkah arogan dalam melaksanakan tugasnya.
- 4 Petugas parkir tidak menggunakan atribut lengkap seperti jaket, tanda pengenal dan tidak memiliki karcis parkir.
- 5 Adanya protes masyarakat terhadap banyaknya lahan parkir di Kota Pekanbaru.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan teknik tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dimana penulis akan menggunakan kondisi objektif yang ditemukan dilapangan berdasarkan data-data yang ada dengan masalah dalam Peranan Dinas Perhubungan dalam menertibkan Parkir Di Wilayah Kota Pekanbaru (Moleong, 2006:6). Penelitian ini dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang terkait dengan masalah sosial (Crowe et al., 2017) yang dapat digunakan untuk menginterpretasi, mengeksplorasi, atau memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek tertentu dari keyakinan, sikap, atau perilaku manusia. Penelitian ini fokus pada persepsi dan pengalaman peserta, juga cara mereka memahami kehidupan. Sedangkan analisis data dibangun secara induktif dari tema khusus ke tema umum, lalu peneliti membuat interpretasi tentang makna data. Peneliti lebih memperhatikan pendapat secara individu dan dituntut untuk mampu menerjemahkan kompleksitas situasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggal oleh pengendara atau pemilik kendaraan bermotor (Nawawi 2015). Secara ketentuan perundang-undangan parkir ditengah jalan sangat dilarang untuk posisi parkir memang diatur pada tepi atau bahu jalan. Biasanya fasilitas parkir dibangun bersamaan dengan pembangunan suatu gedung.

Semakin pesatnya kemajuan yang dialami oleh Kota Pekanbaru namun tidak diimbangi dengan kesiapan infrastruktur parkir ditempat-tempat keramaian. Pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kepemilikan kendaraan pribadi dan hal tersebut tentu saja menimbulkan peningkatan pada permintaan lahan parkir untuk menempatkan kendaraan mereka saat berada ditempat umum. Parkir merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam hal pelayanan serta parkir juga merupakan sumber pendapatan daerah (PAD) atau Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi parkir di badan jalan.

Pengaturan terhadap parkir tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tepatnya pada BAB XXII tentang Pengelolaan Parkir. Dalam ketentuan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tersebut dalam pasal 1 angka 35 menyatakan bahwa parkir merupakan posisi kendaraan berhenti atau tidak bergerak yang untuk beberapa saat kendaraan tersebut di tinggalkan oleh pemiliknya dan atau pengemudinya. Serta fasilitas parkir merupakan suatu lahan atau lokasi yang disediakan sebagai tempat pemberhentian kendaraan tersebut. Parkir merupakan fasilitas yang diambil dari bagian atau badan jalan.

Penempatan parkir dibagi menjadi beberapa posisi antara lain sebagai berikut :

- 1 Parkir ditepi jalan merupakan parkir yang menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir yang memiliki beberapa kerugian antara lain :
 - a. Mengganggu lalu lintas
 - b. Mengurangi kapasitas jalan karena adanya pengurangan lebar lajur lalu lintas
 - c. Meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan

Serta adapun beberapa kelebihan parkir di tepi jalan adalah sebagai berikut :

- a. Murah tanpa investasi tambahan
 - b. Bagi pengguna tempat parkir bisa lebih dekat dan mudah
- 2 Parkir di luar jalan badan jalan merupakan parkir kendaraan yang berada diluar badan jalan bisa saja di halaman gedung, di halaman perkantoran, serta supermarket ataupun pada taman parkir lainnya. Keuntungan parkir diluar badan jalan adalah sebagai berikut :
 - a. Tidak mengganggu lalu lintas
 - b. Faktor keamanan lebih tinggi

Sedangkan kekurangannya antara lain sebagai berikut :

- a. Perlu biaya investasi awal yang besar
- b. Bagi pengguna dirasakan kurang praktis apalagi jikakepentingannya hanya sebentar saja

Sementara itu parkir juga dapat dibagi berdasarkan kedalam beberapa bagian yaitu antara lain sebagai berikut :

- 1 Parkir umum ialah parkir yang menggunakan lahan yang dikuasai dan pengelolaannya diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- 2 Parkir khusus adalah parkir yang menggunakan lahan pengelolaannya diselenggarakan oleh pihak ketiga.
- 3 Parkir darurat merupakan parkir di tempat-tempat umum yang menggunakan lahan milik pemerintah daerah maupun swasta yang terjadi karena kegiatan yang insidental.

Penyelenggaraan dan pengelolaan parkir diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perparkiran adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (DISHUB). Dalam pasal 2 menyebutkan :

- 1) Penyelenggaraan dan pengelolaan tempat parkir umum, parkir khusus yang dikelola oleh swasta, pemerintah dan parkir insidental dilakukan dan atau diawasi oleh Pemerintah Daerah dengan menunjuk Dinas Perhubungan atau Instansi lainnya untuk melaksanakan tugas tersebut dengan keputusan walikota.
- 2) Penyelenggaraan dan pengelolaan tempat Parkir umumdi badan jalan dapat dibagi beberapa kawasan khusus.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kawaasan khusus sebagaimana dimaksud dalamayat (3) diatur dalam peraturan walikota.
- 4) Dinas perhubungan dan atau instansi lainnya dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran melaksanakan tugas dan kewajiban serta bertanggung jawab dalammemberikan pelayanan perparkiran kepada masyarakat yang meliputi kegiatan:
 - a) Lalu lintas kendaraan masuk dan keluar serta penataan kendaraan di tempat parkir.

- b) Penyerahan karsis retribusi parkir dan menerima pembayaram retribusi sebagai imbalan jasa pelayanan parkir.
- c) Pengaturan keamanan lalu lintas dan ketertiban kendaraan yang di parkir.

Kota Pekanbaru yang semakin berkembang pesat menjadi Kota Metropolitan mulaidi tetapkan Visi Kota Pekanbaru 2021 oleh pemerintah Kota Pekanbaru yang berbunyi : “Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa pendidikan serta pusat kebudayaan melayu menuju masyarakat yang berlandaskan Iman dan Takwa”.

Untuk memperbaiki sitem pengelolaan parkir di Kota Pekanbaru perlu dilakukan evaluasi agar parkir di Kota Pekanbaru lebih tertata dan selanjutnya akan mendukung perkembangan Kota Pekanbaru untuk menjadi kota yang berkembang lebih pesat.

Evaluasi adalah suatu cara atau proses yang terjadi untuk melihat suatu sistem kebijakan yang dilakukan oleh suatu kelompok dengan tujuan tertentu yang melakukan membuat rumusan masalah pada suatu kebijakan, melakukan implementasi kebijakan, dan melakukan monitoring atau juga biasa disebut pengawasan terhadap implementasi suatu kebijakan yang telah ditetapkan(Dunn, 2013). Beberapa Kriteria yang harus dilakukan evaluasi adalah mengenai :

- a) Efektifitas
Efektifitas merupakan suatu tolak ukur yang digunakan untuk melihat apakah suatu kebijakan yang telah dilakukan sudah mencapai tujuan yang diinginkan dan apakah kebijakan yang diambil tersebut telah tepat sasaran dan masalah yang ada ditengah-tengah masyarakat dapat di selesaikan dengan baik.
- b) Efisiensi
Efisiensi ini adalah tolak ukur untuk melihat apakah efektivitas yang telah dinilai sebelumnya sudah efektif atau belum.
- c) Kecukupan
Kecukupan ini merupakan suatu indikator yangdigunakan untuk menghitung jumlah dari suatu efektifitas yang telah dilihat sebelumnya yaitu mengenai kecukupan nilai, pemuasan kebutuhan, serta adanya kemungkinan tumbuhnya masalah baru atas dasar kurangnya kecukupan tersebut.
- d) Pemerataan
Pemerataan disini maksudnya apakah suatu kebijakan dan pembagian yang dilakukan dalam mengambil suatu kebijakan tersebut apakah sudah merata atau masih ada yang belum tercover secara keseluruhan.
- e) Responsivitas
Responsivitas ini adalah untuk melihat seberapa besar kepuasan masyarakat terhadap kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah atau suatu kelompok yang memiliki tujuan tertentu terhadap suatu kegiatan yang dilakukan.

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitisn ini penulis menggunakan enam indikator dari teori Evaluasi yang di kemukakan oleh Willliam N Dunn serta untuk menjawab setiap sub indikator yang telah di tentukan adapun Indikator dan Sub Indikator dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Efektifitas

Efektifitas merupakan suatu tolak ukur yang digunakan untuk melihat apakah suatu kebijakan yang telah dilakukan sudah mencapai tujuan yang diinginkan dan apakah kebijakan yang diambil tersebut telah tepat sasaran dan masalah yang ada ditengah-tengah masyarakat dapat di selesaikan dengan baik. Menurut William N Dunn mengatakan bahwa ada beberapa kriteria yang diperlukan untuk memenuhi proses evaluasi kebijakan publik adapun pendapat Willliam N Dunn adalah Epektifitas ini

berkaitan dengan suatu hasil apakah suatu alternatif kegiatan yang dilakukan itu sudah mencapai hasil yang di targetkan atau setidaknya telah mencapai tujuan dari kegiatan tersebut dibuat. Pengukuran dari tingkat efektifitas ini biasanya menggunakan unit produk ataupun nilai dari suatu produk tersebut dimata orang lain (Dunn. 2013).

Berdasarkan defenisi efektifitas yang disampaikan oleh Willliam N Dunn dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu penilaian yang dilakukan terhadap suatu tindakan yang di ambil apakah hasil dari tindakan tersebut telah mencapai tujuan yang kita inginkan dan kita tetapkan dalam suatu kegiatan tersebut. Sedangkan menurut pendapatn efendi efektifitas merupakan suatu pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan tepat sesuai anggaran, Waktu yang telah ditetapkan serta jumlah personil yang ditentukan. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa efektifitas menurut efendi adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dari suatu kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan anggaran, waktu dan personil yang telah ditetapkan sebelumnya.

a) UPTD parkir dalam pengawasan lokasi parkir diwilayah Kota Pekanbaru

Menjawab persoalan dalam Indikator Efektifitas penulis memiliki dua sub indikator, sub indikator yang pertama ialah UPTD parkir dalam pengawasan lokasi parkir di wilayah Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan penulis melihat pelaksanaan penjaan parkir biasanya dilakukan pukul 7 pagi hingga pukul 12 malam tetapi terkadang ada beberapa lokasi yang mana petugas parkirnya memiliki kegigihan hingga melakukan penjagaan parkir hingga jam 2 pagi itu biasanya dijumpai di depan Minimarket atau Swalayan yang buka selama 24 jam.

Serta berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi penulis memiliki analisa bahwa Pelaksanaan pengawasan parkir di Kota Pekanbaru dilakukan mulai dari pukul 06:00 hingga pukul 22:00 m dimana UPT Perparkiran Kota Pekanbaru dibantu oleh petugas atau juru parkir, Serta penjagaan parkir dilakukan dengan dua shif yaitu shif pertama dari pukul 06:00 hingga pukul 15:00 dan shif yang kedua pada pukul 15:00 hingga pukul 22:00. Namun masih dijumpai para petugas atau juru parkir yang melakukan penjagaan tidak sesuai jam operasional yang memungut uang parkir hingga jam 03:00, Jadi dalam hal ini evaluasi yang perlu dilakukan ialah pada pengawasan jam operasional para petugas atau juru parkir perlu di tingkatkan dan diperketat agar tidak adalagi petugas parkir yang meyalahi atau melanggar jam operasional parkir tersebut.

b) Perilaku petugas parkir diwilayah Kota Pekanbaru

Menjawab Indikator efektifitas juga memiliki sub indikator yang kedua yaitu Perilaku petugas parkir diwilayah Kota Pekanbaru yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap dan perilaku petugas atau juru parkir dalam melaksanakan tugas menjaga keamanan dan ketertiban lokasi parkir.

Hasil observasi dilapangan dapat dilihat bahwa memang masih banyak permasalahan parkir yang dijumpai sikap petugas parkir yang sering kali berperilaku seenaknya seperti meminta uang parkir tanpa merapikan letak kendaraan yang otomatis fungsinya untuk penataan tidak berjalan belum lagi perilaku tidak korperatif terkadang tidak mau membagikan uang kembalian alasan tidak ada uang kecil, ada juga yang hanya singgah sebentar disuruh bayar padahan kendaraan tetap di tunggu, perilaku arogan para juru parkir, jarak titik parkir hanya setiap 5 meter dan sudah ada tukang parkir yang baru, yang dimana itu sangat meresahkan sekali bagi masyarakat.dan banyak lagi sebagainya.

Analisa diatas dapat disimpulkan sebuah analisa bahwa permasalahan parkir yang harus dievaluasi adalah sikap petugas parkir yang sering kali berperilaku seenaknya seperti meminta uang parkir tanpa merapikan letak kendaraan yang otomatis fungsinya

untuk penataan tidak berjalan belum lagi perilaku tidak korperatif terkadang tidak mau membagikan uang kembalian alasan tidak ada uang kecil, ada juga yang hanya singgah sebentar disuruh bayar padahal kendaraan tetap di tunggu, perilaku arogan para juru parkir, jarak titik parkir hanya setiap 5 meter dan sudah ada tukang parkir yang baru, yang dimana itu sangat meresahkan sekali bagi masyarakat. dan banyak lagi sebagainya.

2. Efisiensi

Efisiensi ini adalah tolak ukur untuk melihat apakah efektivitas yang telah dinilai sebelumnya sudah efektif atau belum. Efisiensi berhubungan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk mencapai tingkat efisiensi tersebut. Efisiensi itu sendiri merupakan hubungan antara tingkat efektifitas dengan usaha yang digunakan. Efisiensi itu merupakan sumber daya yang digunakan untuk menghitung suatu keberhasilan dan efektifitas tertinggi. Efisiensi ini biasanya dihitung dengan menggunakan perhitungan keberhasilan perunit hasil dari suatu kegiatan yang dilakukan (Dunn, 2013).

Dari pengertian yang disampaikan oleh William N Dunn. Dapat disimpulkan bahwa defenisi dari efisiensi adalah jumlah besaran usaha yang dilakukan untuk mencapai efektifitas. Hubungan antara Efisiensi dengan Efektifitas adalah melihar efektifitas berdasarkan jumlah usaha yang digunakan untuk mencapai efisiensi tersebut serta berapa banya sumber daya yang digunakan untuk mencapai dari sebuah efektifitas. Selain Willian M Dunn Malayu SP Hasibuan juga memiliki pendapat tentang apa itu Efisiensi menurutnya adalah perbandingan antara usaha yang dilakukan dengan hasil yang didapat. Atau juga dapat dilihat besaran sumber daya yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang optimal yang pada dasarnya hasil harus lebih besar dari pada sumber daya yang digunakan (Hasibuan, 1994)

a) Sudah Tertata atau belum parkir di Kota Pekanbaru

Indikator kedua ialah indikator Efisiensi dan dalam indikator ini memiliki dua sub indikator yang pertama ialah sub indikator Tertata atau belum parkir di Kota Pekanbaru.

Hasil observasi juga benar apa yang disampaikan oleh setiap narasumber terutama kurangnya lahan parkir untuk dipusat kota sehingga mengakibatkan banyak kendaraan parkir ditepi jalan dan menyebabkan kemacetan sehingga walalupun setiap lahan parkir sudah dilakukan penataan karena lahan parkirnya yang kurang maka akan tetap mengakibatkan kondisi parkir yang berantakan. Belum lagi ditambah dengan sikap kurang bertanggungjawab para petugas parkir yang tidak menyusun atau menata tempat parkir kendaraan sehingga pemanfaatan lahan parkir menjadi kurang efisien

Analisa berdasarkan keterangan narasumber dan hasil obsevasi dilapangan dapat disimpulkan bahwa Kawasan parkir di kota Pekanbaru masih belum tertata dengan baik, semua itu butuh proses. penyediaan lahan parkir belum mengcover semua kebutuhan parkir umum masyarakat kota Pekanbaru. Masih banyak di tempat-tempat usaha seperti coffeshop yang parkir sampai ketepi jalan sehingga mengganggu pengguna jalan yang lain bahkan di sekitaran sudirman ujung hingga saat ini masih banyak kendaraan yang parkir dibadan jalan sehingga menimbulkan kemacetan. Parkir di Kota pekanbaru tidak akan pernah tertata dengan rapi apabila tidak ada kerjasama yang baik antara masyarakat dengan petugas parkir

b) Manfaat parkir terhadap pengelolaan Tata Ruang dan Tata Kota

Sub indikator efisiensi yang kedua ialah Manfaat parkir terhadap pengelolaan Tata Ruang dan Tata Kota. Sub indikator ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana manfaat parkir terhadap pengelolaan tata ruang dan tata kota apakah memberi pengaruh yang baik atau tidak.

Hasil observasi dilapangan dapat dilihat bahwa parkir itu sangat bermanfaat karena memiliki tujuan untuk merapikan parkir kendaraan dan mengurangi kemacetan karena kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya. Serta uang yang di dapatkan dari retribusi parkir tersebut juga mampu menambah uang pemasukan asli daerah tersebut bahkan tarif parkir yang hanya 3000 sekali parkir untuk kendaraan roda empat dan seterusnya dianggap masih kurang namun karena memikirkan banyaknya protes masyarakat maka dibuatlah aturan tentang tarif 3000 untuk kendaraan roda empat namun sayangnya perilaku nakal para juru parkir yang mengakibatkan terjadi permasalahan serta masih kurang lahan parkir di beberapa bangunan tempat usaha sehingga pengelolaan parkir menjadi kurang efisien.

Analisa untuk pemanfaatan titik parkir pada pengelolaan tata ruang ialah Manfaat adanya titik parkir itu sebenarnya bertujuan untuk merapikan parkir kendaraan dan mengurangi kemacetan karena kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya. Sehingga terciptalah parkir yang rapi dan Kota Pekanbaru yang bebas macet karena tidak ada kendaraan yang parkir dibadan jalan. Serta uang yang di dapatkan dari retribusi parkir tersebut juga mampu menambah uang pemasukan asli daerah tersebut bahkan tarif parkir dan juga berguna untuk menyusun dan mengawasi kendaraan sehingga mengurangi terjadinya pencurian kendaraan bermotor dan menekan angka kriminalitas.

3. Kecukupan

Kecukupan ini merupakan suatu indikator yang digunakan untuk menghitung jumlah dari suatu efektifitas yang telah dilihat sebelumnya yaitu mengenai kecukupan nilai, pemuasan kebutuhan, serta adanya kemungkinan tumbuhnya masalah baru atas dasar kurangnya kecukupan tersebut. Kriteria yang digunakan untuk melakukan sebuah evaluasi kebijakan publik kecukupan memiliki maksud ialah suatu tingkat dari efektifitas yang dimiliki oleh suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan kepuasan, nilai yang baik atau seberapa besar masalah yang timbul akibat dari perbuatan itu dilaksanakan. Kecukupan yang dimaksud disini adalah kinerja apakah kinerja yang dimiliki pegawai sebanding dengan apa yang dibutuhkan untuk mencapai target dari tujuan yang telah di tetapkan (Dunn, 2013).

Pengertian dari kecukupan yang disampaikan oleh Budi Winarno adalah kecukupan yang dirasakan telah mencukupi berbagai hal yang diperlukan oleh semua pihak. Kecukupan ini berubungan dengan berapa besar jumlah efektifitas yang dapat memenuhi kebutuhan, nilai serta kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan ini digunakan untuk bagaimana cara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah apakah sudah efektif dan efisien atau tidak (Winarno, 2002).

a) Penyediaan lahan parkir di Kota Pekanbaru

Indikator yang ketiga ialah Indikator kecukupan, indikator ini juga memiliki dua sub indikator yang pertama ialah sub indikator Penyediaan lahan parkir di Kota Pekanbaru.

Hasil observasi dilapangan dapat dilihat bahwa lahan parkir di Kota Pekanbaru belum mengcover semua kebutuhan parkir umum masyarakat kota Pekanbaru. Masih banyak di tempat-tempat usaha seperti coffeshop yang parkir sampai ketepi jalan sehingga mengganggu pengguna jalan yang lain. banyak sekali bangunan yang berdiri untuk lokasi usaha tapi tidak memikirkan bagaimana tentang lokasi parkirnya.”

Analisa untuk Penyediaan parkir di Kota Pekanbaru belum mengcover semua kebutuhan parkir umum masyarakat kota Pekanbaru. Masih banyak di tempat-tempat usaha seperti coffeshop yang parkir sampai ketepi jalan sehingga mengganggu pengguna jalan yang lain. banyak sekali bangunan yang berdiri untuk lokasi usaha tapi tidak memikirkan bagaimana tentang lokasi parkirnya. Bahkan titik parkir yang terlalu

banyak dan terlalu rapat menimbulkan banyaknya juru parkir jadi mengakibatkan rebutan antar lahan parkir tersebut.

b) Kebijakan yang dibuat Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam mengelola parkir di Kota Pekanbaru.

Sub indikator yang kedua pada indikator kecukupan merupakan kebijakan yang dibuat Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam mengelola parkir di Kota Pekanbaru. sub indikator ini akan melihat apa kebijakan yang dilakukan untuk pengelolaan parkir menjadi lebih baik lagi.

Hasil Observasi kebijakan yang dilakukan oleh UPT Perparkiran Kota Pekanbaru sepertinya hanyalah kerja sama yang dibuat dengan pihak PT. Yabisa agar pengelolaan parkir lebih mudah dan lebih tercover karena jika melihat titik parkir yang ada di Kota Pekanbaru hingga mencapai 1200 titik parkir, jadi tanpa bantuan pihak pengelolaan maka parkir di kota pekanbaru tidak akan dapat berjalan dengan baik dan semakin banyak parkir liar.

Analisis dari kebijakan ini dapat dilihat dari kebijakan yang dilakukan oleh UPT Perparkiran Kota Pekanbaru sepertinya hanyalah kerja sama yang dibuat dengan pihak PT. Yabisa agar pengelolaan parkir lebih mudah dan lebih tercover karena jika melihat titik parkir yang ada di Kota Pekanbaru hingga mencapai 1200 titik parkir, jadi tanpa bantuan pihak pengelolaan maka parkir di kota pekanbaru tidak akan dapat berjalan dengan baik dan semakin banyak parkir liar. Dari PT. Yabisa itu sendiri dengan memasang cctv di beberapa titik parkir tertentu, memberikan pelatihan dan pembelajaran kepada juru parkir agar dalam memberikan pelayanan lebih mengedepankan sikap ramah sopan dan mudah senyum.

4. Pemerataan

Pemerataan disini maksudnya apakah suatu kebijakan dan pembagian yang dilakukan dalam mengambil suatu kebijakan tersebut apakah sudah merata atau masih ada yang belum tercover secara keseluruhan. Pemerataan memiliki hubungan yang erat dengan rasionalitas yang legal, kehidupan sosial serta menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok masyarakat yang hidup dalam suatu daerah (Dunn, 2013).

Dapat disimpulkan dari definisi di atas bahwa pemerataan memiliki hubungan yang erat dengan rasionalitas yang legal, kehidupan sosial serta menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok masyarakat yang hidup dalam suatu daerah. Yang termasuk kedalam pemerataan atau kesamaan tersebut adalah suatu akuntabilitas. Akuntabilitas ini merupakan apakah perbuatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku.

Budi Winarno juga memberikan pengertian tentang apa itu yang dimaksud dengan kesamaan yaitu memiliki arti keadilan bagi seluruh masyarakat atau seluruh pihak yang terlibat. Kesamaan ini memiliki hubungan yang erat dengan akuntabilitas yang dimiliki oleh setiap pekerja (Winarno, 2002).

a) Hasil dari Retribusi parkir dirasakan kembali oleh masyarakat.

Sub indikator dalam indikator kesamaan ialah melihat hasil dari retribusi tersebut dapat dirasakan kembali oleh masyarakat atau tidak maka dalam penelitian ini dibahas melalui hasil wawancara.

Hasil observasi penulis dilapangan tentu saja banyak pihak yang tidak mengetahui apakah hasil retribusi tersebut dapat dirasakan langsung atau tidak oleh masyarakat karena tidak ada transparansi mengenai dana pengelolaan retribusi parkir tersebut baik itu kepada pihak juru parkir, pihak perusahaan yang bekerja sama maupun kepada masyarakat.

Analisa penulis berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara diatas ialah dapat disimpulkan bahwa retribusi dari parkir tersebut diserahkan oleh Dishub kepada Pemerintah daerah dan merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah. Setelah diserahkan kepada pemerintah daerah pihak UPT Perparkiran maupun pihak Dishub sendiri tidak mengetahui untuk apa saja uang retribusi tersebut namun jika retribusi merupakan pendapatan asli daerah maka uang yang dikumpulkan dari pendapatan asli daerah tersebut akan berguna untuk memenuhi kebutuhan anggaran dan dana yang dibutuhkan untuk pengelolaan pemerintahan dan pembangunan di Kota Pekanbaru.

b) Hasil retribusi parkir diserahkan sepenuhnya kepada pihak pemerintah

Indikator kesamaan juga memiliki sub indikator yang kedua yaitu untuk melihat hasil retribusi tersebut apakah diserahkan seluruhnya kepada pihak pemerintah daerah atau ada pembagian hasil retribusi tersebut dengan beberapa pihak.

Hasil Observasi penulis ialah tidak adanya transparansi pengelolaan dana retribusi tersebut mengakibatkan masyarakat bahkan UPT parkir sendiri bagaimana pengelolaan dan penggunaan retribusi parkir tersebut.

Analisa dari sub indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa penyerahan uang retribusi oleh pihak UPT Perparkiran diserahkan seluruhnya namun untuk bagaimana selanjutnya para pihak tidak mengetahui karena tidak adanya transparansi pengelolaan dana retribusi tersebut mengakibatkan masyarakat bahkan UPT parkir sendiri bagaimana pengelolaan dan penggunaan retribusi parkir tersebut. retribusi dari parkir tersebut diserahkan oleh Dishub kepada Pemerintah daerah dan merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah.

5. Responsivitas

Responsivitas ini adalah untuk melihat seberapa besar kepuasan masyarakat terhadap kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah atau suatu kelompok yang memiliki tujuan tertentu terhadap suatu kegiatan yang dilakukan. Responsivitas ini memiliki merupakan hubungan antara kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat (Dunn, 2013).

Berdasarkan keterangan dari William N Dunn Responsivitas disimpulkan sebagai seberapa besar kebijakan dapat menyelesaikan masalah yang telah terjadi, preferensi, atau nilai-nilai yang terkandung untuk mengenal kebutuhan yang dimiliki oleh masyarakat, mengatur kegiatan, atau mengembangkan program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan yang dimiliki oleh masyarakat.

a) Peranan masyarakat dalam menjalankan pengawasan petugas parkir

Indikator Responsivitas juga memiliki dua Sub indikator yang mana sub indikator pertama yaitu tentang peran masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku dari juru parkir tersebut yang kemudian memberikan jawaban dalam hasil wawancara.

Hasil observasi mengenai peran masyarakat ialah peran masyarakat memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan perilaku para juru parkir yang bertugas menjaga parkit dititik-titik parkir tersebut karena masyarakat yang merasakan dan berhubungan langsung dengan setiap petugas atau juru parkir dilapangan.

Analisa tentang sub indikator tersebut ialah Masyarakat memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan perilaku para juru parkir yang bertugas menjaga parkit dititik-titik parkir tersebut karena masyarakat yang merasakan dan berhubungan langsung dengan setiap petugas atau juru parkir dilapangan. Laporan masyarakat terkait kekurangan ataupun permasalahan yang dijumpai dilapangan akan menjadi hal-hal yang akan di evaluasi dan akan dicarikan solusi penyelesaiannya.

b) Peranan media sosial dalam mengawasi tugas juru parkir

Sub indikator yang kedua dalam indikator Responsivitas ialah peranan yang dimiliki oleh media sosial dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja juru parkir dikota pekanbaru.

Hasil Observasi penulis dalam penelitian ini adalah peran media sosial sangat penting membantu dalam menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dijumpai dalam pengelolaan parkir dilapangan contohnya beberapa kasus yang pernah viral itu menjadi tinjauan UPT Perparkiran Kota Pekanbaru dalam melakukan evaluasi.

Analisa terkait sub bab ini ialah peranan media sosial dilihat dari fungsi penyebarluasannya yang salah satunya sebagai sumber bantuan untuk masyarakat dalam menyampaikan informasi kepada pemerintah tentang hal-hal apa saja yang menjadi permasalahan dilapangan dan hal-hal apa saja yang harus dilakukan evaluasi dengan adanya media sosial informasi-informasi tersebut akan lebih cepat tersampaikan dari pada dilakukan laporan secara langsung Kepada UPT Perparkiran Kota Pekanbaru.

6. Ketepatan

Ketepatan merupakan suatu penempatan yang baik dikarenakan suatu kebijakan dilakukan pas atau memang betul-betul diperlukan maka dengan demikian dikatakan bahwa kebijakan tersebut sudah tepat untuk dilakukan sehingga suatu kebijakan akan lebih berguna, lebih efektif dan lebih efisien dibandingkan dengan suatu kebijakan lain yang tidak dibutuhkan.

a) Cara melakukan Penataan yang baik pada persoalan parkir dikota pekanbaru

Dalam indikator ketepatan ini ada dua sub indikator yaitu yang pertama ialah cara melakukan penataan yang baik terhadap permasalahan-permasalahan parkir di Kota pekanbaru.

Hasil Observasi dilapangan penulis melihat untuk strategi baru yang dilakukan bisa melihat seperti kebijakan yang dilakukan pemerintahan Kota Medan yang membuat parkir berlangganan secara elektronik sehingga dengan demikian uang parkir akan lebih terorganisir dan gaji untuk para juru parkir bisa diberikan perbulan. Sehingga hal tersebut juga mengurangi permasalahan antara juru parkir dengan masyarakat.

Analisa dalam sub indikator ini ialah masyarakat dan pemerintah saling bekerjasama dan juga harus saling berkolaborasi untuk menentukan lokasi-lokasi yang mana yang boleh dan tidak boleh. melihat untuk strategi baru yang dilakukan bisa melihat seperti kebijakan yang dilakukan pemerintahan Kota Medan yang membuat parkir berlangganan secara elektronik sehingga dengan demikian uang parkir akan lebih terorganisir dan gaji untuk para juru parkir bisa diberikan perbulan. Sehingga hal tersebut juga mengurangi permasalahan antara juru parkir dengan masyarakat.

b) Lokasi dan SOP parkir yang diharapkan masyarakat Kota Pekanbaru

Serta berbicara tentang evaluasi maka tentunya kita juga perlu untuk mendengar bagaimana keinginan dan harapan masyarakat terhadap perkembangan pengelolaan parkir sehingga dalam sub indikator kedua ini penulis kita dan SOP parkir yang diharapkan masyarakat Kota Pekanbaru.

Hasil observasi dilapangan memang sering dijumpai petugas parkir hanya datang meminta uang bahkan saat masyarakat datang petugas atau juru parkir tidak ada pas mau pergi tiba-tiba saja datang meminta uang parkir bahkan sepeda motor dibiarkan terparkir berantakan. Nanti pada saat masyarakat melakukan protes juru parkir menghadapi masyarakat dengan arogan sehingga dengan demikian timbulah keributan jadi dengan adanya permasalahan tersebut masyarakat meminta kepada pemerintah jika benar ini parkir resmi dan uangnya diambil untuk retribusi maka hendaknya memilih

tukang parkir yang memang bertanggungjawab dalam bekerja sehingga perselisihan dan keributan seperti ini tidak akan terjadi lagi.

Dari penjelasan diatas dapat dibuat sebuah analisa bahwa keinginan masyarakat untuk parkir kedepannya sebutan kota pekanbaru sebagai kota seribu parkir itu benar adanya bahkan ditempat-tempat yang seharusnya tidak dipungut parkir pun masih juga diminta uang parkir entah itu resmi atau tidak tetapi sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan lagi contohnya membeli nasi di depan warung ampera nasi yang seharusnya seharga 13.000 karena parkir menjadi 15.000 berpindah nanti membeli minum ke Indomaret nanti parkir lagi dua ribuh sedikitnya kami sebagai masyarakat sehari mengeluarkan uang parkir 20.000 untuk berpergian jika dikalikan 30 hari maka akan tertotal lebih kurang 600.000 yang mau tidak mau itu wajib dikeluarkan karena kebutuhan jadi dengan demikian seharusnya pemerintah lebih mempertimbangkan lagi bahkan $\frac{1}{4}$ gaji masyarakat yang dengan standar UMR habis untuk parkir saja maka dengan demikian pemerintah harus melakukan pertimbangan dan melakukan pengelolaan parkir dengan penuh tanggung jawab lagi. Selain itu sering dijumpai petugas parkir hanya datang meminta uang bahkan saat masyarakat datang petugas atau juru parkir tidak ada pas mau pergi tiba-tiba saja datang meminta uang parkir bahkan sepeda motor dibiarkan terparkir berantakan. Nanti pada saat masyarakat melakukan protes juru parkir menghadapi masyarakat dengan arogan sehingga dengan demikian timbulah keributan jadi dengan adanya permasalahan tersebut masyarakat meminta kepada pemerintah jika benar ini parkir resmi dan uangnya diambil untuk retribusi maka hendaknya memilih tukang parkir yang memang bertanggungjawab dalam bekerja sehingga perselisihan dan keributan seperti ini tidak akan terjadi lagi.

Kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan Dalam Pengendalian Dan Pengawasan Parkir Di Kota Pekanbaru.

Dalam permasalahan melakukan evaluasi terhadap kinerja UPT Perparkiran Dishub Kota Pekanbaru maka tentu saja menemukan kendala-kendala dalam pelaksanaan penertiban uang parkir untuk mengetahui apa saja kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan pengelolaan parkir di Kota Pekanbaru.

Hasil observasi terhadap kendala dilapangan dijumpai bahwa dititik lokasi parkir tidak ada kamera pengawas seperti cctv dengan begitu petugas parkir menjadi lebih mudah untuk melakukan kecurangan seperti tidak memberikan karcis parkir dan tidak melakukan tugasnya dengan baik dan benar bahwa kerapkali juru parkir tidak merapikan kendaraan sesuai dengan tugas mereka sebagai juru parkir.

Analisa terkait tentang kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dan pengawasan terhadap pengelolaan parkir di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Kendalanya ialah luasnya wilayah kota pekanbaru sehingga mengakibatkan pengawasan menjadi terhambat.
2. Masih kurangnya kamera pengawas cctv pada setiap titik parkir sehingga kinerja juru parkir belum diawasi dengan baik dengan begitu petugas parkir menjadi lebih mudah untuk melakukan kecurangan seperti tidak memberikan karcis parkir dan tidak melakukan tugasnya dengan baik dan benar bahwa kerapkali juru parkir tidak merapikan kendaraan sesuai dengan tugas mereka sebagai juru parkir.
3. Masyarakat yang juga terkadang tidak mendukung pengawasan dengan tidak memberikan laporan sehingga evaluasi terhadap kinerja juru parkir menjadi lambat dan berpengaruh terhadap perkembangan pengelolaan parkir oleh UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota PEkanbaru.

SIMPULAN

Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Efektivitas Pelaksanaan pengawasan parkir di Kota Pekanbaru belum efektif karena masih dijumpai para petugas atau juru parkir yang melakukan penjagaan tidak sesuai jam operasional yang memungut uang parkir hingga jam 03:00, Jadi dalam hal ini evaluasi yang perlu dilakukan ialah pada pengawasan jam operasional para petugas atau juru parkir perlu di tingkatkan dan diperketat agar tidak adalagi petugas parkir yang meyalahi atau melanggar jam operasional parkir tersebut. Permasalahan parkir yang harus dievaluasi adalah sikap petugas parkir yang sering kali berperilaku seenaknya seperti meminta uang parkir tanpa merapikan letak kendaraan yang otomatis fungsinya untuk penataan tidak berjalan belum lagi perilaku tidak korperatif terkadang tidak mau membagikan uang kembalian alasan tidak ada uang kecil, ada juga yang hanya singgah sebentar disuruh bayar padahal kendaraan tetap di tunggu, perilaku arogan para juru parkir, jarak titik parkir hanya setiap 5 meter dan sudah ada tukang parkir yang baru, yang dimana itu sangat meresahkan sekali bagi masyarakat.dan banyak lagi sebagainya.
2. Efisiensi pengelolaan Kawasan parkir di kota Pekanbaru masih belum tertata dengan baik, semua itu butuh proses. penyediaan lahan parkir belum mengcover semua kebutuhan parkir umum masyarakat kota Pekanbaru. Masih banyak di tempat-tempat yang parkir sampai ketepi jalan sehingga mengganggu pengguna jalan yang lain bahkan di sekitaran sudirman ujung hingga saat ini masih banyak kendaraan yang parkir dibadan jalan sehingga menimbulkan kemacetan. Parkir di Kota pekanbaru tidak akan pernah tertata dengan rapi apabila tidak ada kerjasama yang baik antara masyarakat dengan petugas parkir. Pemanfaatan titik parkir pada pengelolaan tata ruang ialah Manfaat adanya titik parkir itu sebenarnya bertujuan untuk merapikan parkir kendaraan dan mengurangi kemacetan karena kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya. Sehingga terciptalah parkir yang rapi dan Kota Pekanbaru yang bebas macet karena tidak ada kendaraan yang parkir dibadan jalan. Serta uang yang di dapatkan dari retribusi parkir tersebut juga mampu menambah uang pemasukan asli daerah tersebut bahkan tarif parkir dan juga berguna untuk menyusun dan mengawasi kendaraan sehingga mengurangi terjadinya pencurian kenndaraan bermotor dan menekan aangka kriminalitas.
3. Kecukupan dalam Penyediaan parkir di Kota Pekanbaru belum mengcover semua kebutuhan parkir umum masyarakat kota Pekanbaru. Masih banyak di tempat-tempat usaha seperti coffeshop yang parkir sampai ketepi jalan sehingga mengganggu pengguna jalan yang lain. banyak sekali bangunan yang berdiri untuk lokasi usaha tapi tidak memikirkan bagaimana tentang lokasi parkirnya. Bahkan titik parkir yang terlalu banyak dan terlalu rapat menimbulkan banyaknya juru parkir jadi mengakibatkan rebutan antar lahan parkir tersebut. Serta kebijakan ini dapat dilihat dari kebijakan yang dilakukan oleh UPT Perparkiran Kota Pekenbaru sepertinya hanyalah kerja sama yang dibuat dengan pihak PT. Yabisa agar pengelolaan parkir lebih mudah dan lebih tercover. Dari PT. Yabisa itu sendiri dengan memasang cctv dibeberapa titik parkir tertentu, memberikan pelatihan dan pembelajaran kepada juru parkir agar dalam memberikan pelayanan lebih mengedepankan sikap ramah sopan dan mudah senyum.
4. Pemerataan dapat disimpulkan bahwa penyerahan uang retribusi oleh pihak UPT Perparkiran diserahkan seluruhnya namun untuk bagaimana selanjutnya para pihak tidak mengetahui karena tidak adanya transparansi pengelolaan dana retribusi tersebut.retribusi dari parkir tersebut diserahkan oleh Dishub kepada Pemerintah daerah dan merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah. Setelah diserahkan kepada pemerintah daerah pihak UPT Perparikiran maupun pihak Dishub sendiri tidak mengetahui untuk apa saja uang retribusi tersebut namun jika retribusi merupakan pendapatan asli daerah maka uang yang dikumpulkan dari pendapatan

asli daerah tersebut akan berguna untuk memenuhi kebutuhan anggaran dan dana yang dibutuhkan untuk pengelolaan pemerintahan dan pembangunan di Kota Pekanbaru.

5. Responsivitas dalam peran masyarakat ialah memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan perilaku para juru parkir yang bertugas menjaga parkir dititik-titik parkir tersebut karena masyarakat yang merasakan dan berhubungan langsung dengan setiap petugas atau juru parkir dilapangan. Laporan masyarakat terkait kekurangan ataupun permasalahan yang dijumpai dilapangan akan menjadi hal-hal yang akan di evaluasi dan akan dicarikan solusi penyelesaiannya. Peranan media sosial dilihat dari fungsi penyebarluasnya yang salah satunya sebagai sumber bantuan untuk masyarakat dalam menyampaikan informasi kepada pemerintah tentang hal-hal apa saja yang menjadi permasalahan dilapangan dan hal-hal apa saja yang harus dilakukan evaluasi dengan adanya media sosial informasi-informasi tersebut akan lebih cepat tersampaikan dari pada dilakukan laporan secara langsung Kepada UPT Perparkiran Kota Pekanbaru.
6. Ketepatan dapat dilihat dari masyarakat dan pemerintah saling bekerjasama dan juga harus saling berkolaborasi untuk menentukan lokasi-lokasi yang mana yang boleh dan tidak boleh untuk parkir. melihat untuk strategi baru yang dilakukan bisa melihat seperti kebijakan yang dilakukan pemerintahan Kota Medan yang membuat parkir berlangganan secara elektronik sehingga dengan demikian uang parkir akan lebih terorganisir dan gaji untuk para juru parkir bisa diberikan perbulan. Sehingga hal tersebut juga mengurangi permasalahan antara juru parkir dengan masyarakat. Sementara keinginan masyarakat untuk parkir kedepannya sebutan kota pekanbaru sebagai kota seribu parkir itu benar adanya maka dengan demikian pemerintah harus melakukan pertimbangan dan melakukan pengelolaan parkir dengan penuh tanggung jawab lagi. Selain itu sering dijumpai petugas parkir hanya datang meminta uang bahkan saat masyarakat datang petugas atau juru parkir tidak ada pas mau pergi tiba-tiba saja datang meminta uang parkir masyarakat meminta kepada pemerintah jika benar ini parkir resmi dan uangnya diambil untuk retribusi maka hendaknya memilih tukang parkir yang memang bertanggungjawab dalam bekerja sehingga perselisihan dan keributan seperti ini tidak akan terjadi lagi.
7. kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dan pengawasan terhadap pengelolaan parkir di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :
 - a. Kendalanya ialah luasnya wilayah kota pekanbaru sehingga mengakibatkan pengawasan menjadi terhambat.
 - b. Masih kurangnya kamera pengawas cctv pada setiap titik parkir sehingga kinerja juru parkir belum diawasi dengan baik dengan begitu petugas parkir menjadi lebih mudah untuk melakukan kecurangan seperti tidak memberikan karcis parkir dan tidak melakukan tugasnya dengan baik dan benar bahwa kerap kali juru parkir tidak merapikan kendaraan sesuai dengan tugas mereka sebagai juru parkir.
 - c. Masyarakat yang juga terkadang tidak mendukung pengawasan dengan tidak memberikan laporan sehingga evaluasi terhadap kinerja juru parkir menjadi lambat dan berpengaruh terhadap perkembangan pengelolaan parkir oleh UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

Crowe, S., Cresswell, K., Robertson, A., Huby, G., Avery, A., & Sheikh, A. (2011). The case study approach. *BMC Medical Research Methodology*, 11(1), 1–9.

- Fadillah, S. N., & Setyorini, R. (2021). Analisis implementasi strategi content marketing dalam menciptakan customer engagement di media sosial Instagram Wakaf Daarut Tauhiid Bandung. *Menara Ilmu*, XV(02), 100–116.
- Febrian, R. A., Rahman, K., Yuza, A. F., & Zainal, Z. (2023). Local government innovation model in Pekanbaru City, Indonesia: a study of public service mall. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(2), 302–314.
- Harimbawa, G., Sumaryadi, I. N., Djohan, D., & Mulyati, D. (2022). Government Collaboration on Controlling Illegal Mining in West Nusa Tenggara Province. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(1).
- Huberman, M., & Miles, M. B. (2002). *The qualitative researcher's companion*. sage.
- Iskandar, D. (2015). *Penelitian Tindakan Kelas dan Publikasinya*. Ihya Media.
- Iskandar, P. (2012). *Hukum HAM Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual*. Institute for Migrant Rights.
- Juanda, J. (2004). *Analisis karakteristik usaha warung tegal di kebayoran baru jakarta selatan dan implikasinya terhadap pemberian kredit mikro pada pt bank bni*. Institut Pertanian Bogor.
- Moleong, L. J. (2016). *Metedologi penelitian kualitatif* (Vol. 2448). Kakek nenek.
- Ndraha, E. (2019). *Pengaruh Kemampuan Finansal Dan Keamanan Terhadap Minat Penggunaan Produk E-Money (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Hkbp Nommensen Medan)*.
- Nugroho, R. (2020). *Public Policy 6-Edisi Revisi*. Elex Media Komputindo.
- Nurcholis, H. (2005). *Teori&Praktik Pmrintahan&Otda (Rev)*. Grasindo.
- Rahman, S. (2004). *Pembangunan dan Otonomi Daerah, Realisasi Program Gotong Royong*. Pancar Suwuh, Jakarta.
- Rasyid, M. R. (2017). *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan*. Mutiara Sumber Widya.
- Sarundajang, S. H. (2017). *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Syafi'ie, M. (2014). Pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. *Inklusi*, 1(2), 269–308.
- Syafiie, I. K. (2013). *kepemimpinan pemerintahan Indonesia*. Refika Aditama.
- Taliziduhu, N. (2013). *Kybernology: ilmu pemerintahan baru*. Rineka Cipta.
- Warsito, B. (2009). *Kapita Seleкта Statistika Neural Network*.
- Wilson, A. M. (2006). *Marketing research: an integrated approach 2nd edition*. FT Prentice Hall.